



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141  
[disdagperin.bekasikota.go.id](http://disdagperin.bekasikota.go.id)



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI.....  | i  |
| DAFTAR TABEL.....  | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2Landasan Hukum.....   | 4  |
| 1.3Maksud dan Tujuan .....   | 7  |
| 1.4Sistematika Penulisan.....  | 7  |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>BERJALAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....            | 9  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) dan<br>CapaianRenstra Perangkat Daerah ..... | 9  |
| 2.2Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 16 |
| 2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                                      | 18 |
| 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....   | 19 |
| 2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....  | 28 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH   |    |
| BAB IV PENUTUP.....  |    |

## DAFTAR TABEL



---

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Disdagperin Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.....        | 10 |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025.....      | 17 |
| Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.....  | 21 |
| Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....   | 28 |
| Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024..... | 33 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan Rancangan Akhir;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:



1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan pembangunan dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.



Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bekasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun untuk bersinergi dengan RKPD Kota Bekasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

RKPD Disdagperin Tahun 2025 mengusung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan;
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman;
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan mempedomani Tujuan RPD Kota Bekasi; Disdagperin melaksanakan **Tujuan Ke-1 dan Tujuan Ke-5** yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel,” dan “Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota.”

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Pertama** adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian.

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kelima** yaitu “Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota”. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh dua sasaran, yaitu (1)



Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi, dan (2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian.

Arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital;
2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif;
4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan;
5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (12/241/2024));
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor      Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor    ).
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).



### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perubahan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 adalah untuk sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek Perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada Masyarakat;
- b. Memberikan Gambaran kemampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Kota Bekasi;
- c. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- e. Menjadi pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025;
- f. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdagperin Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP



## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun berkenaan yaitu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 mendukung pencapaian target dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, serta mengidentifikasi tantangan dan perbaikan ke depan.

Pada tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.35.647.654.470. Sumber dana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2025 tersebut bersumber dari PABD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tertuang pada tabel berikut:



Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdagperin Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

| Kode     | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)  | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |       |                  |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) |              |      |
|----------|---|--|---|------------------|--|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------|-------|------------------|-----|----|----|----|---|---|--------------|--|---------|--|--------------|------|
|          |   |  |   |                  |  |                   |   |                   | I                               |                  | II    |                  | III |    | IV |    |   |   |              |  |         |  |              |      |
| 1        | 2   | 3  | 4   |                  | 5  |                   | 6   |                   | 7                               |                  | 8     |                  | 9   |    | 10 |    | 11=7+8+9+10   |   | 12=11/6x100% |  | 13=5+11 |  | 14=13/4x100% |      |
|          |   |  | K   | Rp               | K  | Rp                | K   | Rp                | K                               | Rp               | K     | Rp               | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K            | Rp   | K       | Rp   | K            | Rp   |
| 3        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |   |                  |  |                   | 100%  | 35.647.654.470,00 | 5,09                            | 5.964.242.009,00 | 25,57 | 7.596.287.812,00 |     |    |    |    | 30,65   | 13.560.529.821,00   | 30,65        | 38,04  | 30,65   | 13.560.529.821,00  |              |      |
| 3.30     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |  |   |                  |  |                   | 100%  | 33.854.005.470,00 | 5,27                            | 5.964.242.009,00 | 26,52 | 7.596.287.812,00 |     |    |    |    | 31,79   | 13.560.529.821,00   | 31,79        | 40,06  | 31,79   | 13.560.529.821,00  |              |      |
| 3.30.1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100,00%   | 2.879.950.000,00 | 95,00%   | 20.904.881.959,00 | 100,00%   | 29.016.692.220,00 | 6,02                            | 5.485.742.009,00 | 27,6  | 6.536.198.171,00 |     |    |    |    | 33,62   | 12.021.940.180,00   | 33,62        | 41,43  | 33,62   | 12.021.940.180,00  | 33,62        | 0,42 |
| 1.2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |                  |  |                   | 100%  | 14.999.000,00     | 0                               | 0                | 33,33 | 0                |     |    |    |    | 33,33   | 0   | 33,33        | 0  | 33,33   | 0  | 33,33        | 0    |
| 1.2.01.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |                  |  |                   | 3,00 Laporan  | 14.999.000,00     | 0                               | 0                | 1     | 0                |     |    |    |    | 1   | 0   | 33,33        | 0  | 1       | 0  | 1            | 0    |
|          |   | Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  | 100,00%   |                  |  |                   | 100,00%   |                   |                                 |                  |       |                  |     |    |    |    |   |   |              |  |         |  |              |      |
| 1.2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  |   |                  |  |                   | 100%  | 23.658.320.000,00 | 12,5                            | 4.633.930.613,00 | 10,06 | 5.396.897.751,00 |     |    |    |    | 22,56   | 10.030.828.364,00   | 22,56        | 42,4   | 22,56   | 10.030.828.364,00  | 22,56        | 0,35 |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| Kode          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)                                      | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                       |              |                       |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) |             |
|---------------|--|--|---|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|----|----|----|---|-----------------------|---|--------------|--|-----------------------|--|-------------|
|               |  |  |   |  |  |  |   |                       | I                               |                       | II           |                       | III |    | IV |    |   |                       |   |              |  |                       |  |             |
|               |  |  |   |  |  |  |   |                       | K                               | Rp                    | K            | Rp                    | K   | Rp | K  | Rp |   |                       |   |              |  |                       |  |             |
| 1.2.02.1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |   |  |  |  | 3.220 Orang/bulan   | 23.643.320.000,00     | 805                             | 4.633.930.613,00      | 648          | 5.396.897.751,00      |     |    |    |    | 1.453,00  | 10.030.828.364,00     | 45,12   | 42,43        | 1.453,00   | 10.030.828.364,00     | 1.453,00   | 0           |
| 1.2.02.5      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |   |  |  |  | 2,00 Laporan  | 15.000.000,00         | 0                               | 0                     | 0            | 0                     |     |    |    |    | 0   | 0                     | 0   | 0            | 0  | 0                     | 0  | 0           |
|               |  | <b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>100,00 %</b>   |  |  |  | <b>100,00%</b>  |                       |                                 |                       |              |                       |     |    |    |    |   |                       |   |              |  |                       |  |             |
| <b>1.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                         | <b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   |   |  |  |  | <b>100%</b>   | <b>475.000.000,00</b> | <b>0</b>                        | <b>179.332.000,00</b> | <b>33,33</b> | <b>0</b>              |     |    |    |    | <b>33,33</b>  | <b>179.332.000,00</b> | <b>33,33</b>  | <b>37,75</b> | <b>33,33</b>   | <b>179.332.000,00</b> | <b>33,33</b>   | <b>0,01</b> |
| 1.2.05.2      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |   |  |  |  | 1,00 Paket  | 260.000.000,00        | 0                               | 0                     | 0            | 0                     |     |    |    |    | 0   | 0                     | 0   | 0            | 0  | 0                     | 0  | 0           |
| 1.2.05.9      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |   |  |  |  | 10,00 Orang   | 15.000.000,00         | 0                               | 0                     | 0            | 0                     |     |    |    |    | 0   | 0                     | 0   | 0            | 0  | 0                     | 0  | 0           |
| 1.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |   |  |  |  | 140,00 Orang  | 200.000.000,00        | 0                               | 179.332.000,00        | 140          | 0                     |     |    |    |    | 140   | 179.332.000,00        | 100   | 89,67        | 140  | 179.332.000,00        | 140  | 0           |
|               |  | <b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>100,00%</b>  |  |  |  | <b>100,00%</b>  |                       |                                 |                       |              |                       |     |    |    |    |   |                       |   |              |  |                       |  |             |
| <b>1.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                | <b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   |  |  |  | <b>100%</b>   | <b>796.172.900,00</b> | <b>10</b>                       | <b>0</b>              | <b>22</b>    | <b>271.142.862,00</b> |     |    |    |    | <b>32</b>   | <b>271.142.862,00</b> | <b>32</b>   | <b>34,06</b> | <b>32</b>  | <b>271.142.862,00</b> | <b>32</b>  | <b>0,01</b> |
| 1.2.06.4      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |   |  |  |  | 5,00 Paket  | 437.567.000,00        | 0                               | 0                     | 3            | 271.142.862,00        |     |    |    |    | 3   | 271.142.862,00        | 60  | 61,97        | 3  | 271.142.862,00        | 3  | 0           |
| 1.2.06.5      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |   |  |  |  | 2,00 Paket  | 9.999.900,00          | 0                               | 0                     | 0            | 0                     |     |    |    |    | 0   | 0                     | 0   | 0            | 0  | 0                     | 0  | 0           |
| 1.2.06.6      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                       |   |  |  |  | 12,00 Dokumen   | 45.000.000,00         | 3                               | 0                     | 3            | 0                     |     |    |    |    | 6   | 0                     | 50  | 0            | 6  | 0                     | 6  | 0           |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| Kode      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)                          | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) |      |
|-----------|---|--|---|--|--|--|---|------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|-----|----|----|----|---|------------------|---|-------|--|------------------|--|------|
|           |   |  |   |  |  |  |   |                  | I                               |                | II    |                | III |    | IV |    |   |                  |   |       |  |                  |  |      |
|           |   |  |   |  |  |  |   |                  | K                               | Rp             | K     | Rp             | K   | Rp | K  | Rp |   |                  |   |       |  |                  |  |      |
| 1.2.06.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |   |  |  |  | 12,00<br>Laporan  | 250.000.000,00   | 3                               | 0              | 3     | 0              |     |    |    |    | 6   | 0                | 50  | 0     | 6  | 0                | 6  | 0    |
| 1.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |   |  |  |  | 1,00<br>Dokumen   | 53.606.000,00    | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    |    |    | 0   | 0                | 0   | 0     | 0  | 0                | 0  | 0    |
| 1.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |  |  | 100%  | 90.916.000,00    | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    |    |    | 0   | 0                | 0   | 0     | 0  | 0                | 0  | 0    |
| 1.2.07.6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |   |  |  |  | 14,00<br>Unit   | 90.916.000,00    | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    |    |    | 0   | 0                | 0   | 0     | 0  | 0                | 0  | 0    |
|           |   | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100,00%   |  |  |  | 100,00%   |                  |                                 |                |       |                |     |    |    |    |   |                  |   |       |  |                  |  |      |
| 1.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |  |  |  | 100%  | 3.591.284.320,00 | 16,67                           | 672.479.396,00 | 25    | 834.269.448,00 |     |    |    |    | 41,67   | 1.506.748.844,00 | 41,67   | 41,96 | 41,67  | 1.506.748.844,00 | 41,67  | 0,05 |
| 1.2.08.2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |   |  |  |  | 12,00<br>Laporan  | 100.000.000,00   | 2                               | 6.562.032,00   | 3     | 25.529.277,00  |     |    |    |    | 5   | 32.091.309,00    | 41,67   | 32,09 | 5  | 32.091.309,00    | 5  | 0    |
| 1.2.08.4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |   |  |  |  | 12,00<br>Laporan  | 3.491.284.320,00 | 2                               | 665.917.364,00 | 3     | 808.740.171,00 |     |    |    |    | 5   | 1.474.657.535,00 | 41,67   | 42,24 | 5  | 1.474.657.535,00 | 5  | 0    |
|           |   | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100,00%   |  |  |  | 100,00%   |                  |                                 |                |       |                |     |    |    |    |   |                  |   |       |  |                  |  |      |
| 1.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   |   |  |  |  | 100%  | 390.000.000,00   | 0                               | 0              | 45,83 | 33.888.110,00  |     |    |    |    | 45,83   | 33.888.110,00    | 45,83   | 8,69  | 45,83  | 33.888.110,00    | 45,83  | 0    |
| 1.2.09.1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |   |  |  |  | 6,00<br>Unit  | 200.000.000,00   | 0                               | 0              | 3     | 33.888.110,00  |     |    |    |    | 3   | 33.888.110,00    | 50  | 16,94 | 3  | 33.888.110,00    | 3  | 0    |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)                          | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                |     |    |       |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) |        |              |    |
|----------|---|--|---|----------------|--|------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|-----|----|-------|------------------|---|---|--|------------------|--|--------|--------------|----|
|          |   |  |   |                |  |                  |   |                  | I                               |                | II    |                | III |    | IV    |                  |   |   |  |                  |  |        |              |    |
| 1        | 2   | 3  | 4   |                | 5  |                  | 6   |                  | 7                               |                | 8     |                | 9   |    | 10    |                  | 11=7+8+9+10   |   | 12=11/6x100%   |                  | 13=5+11  |        | 14=13/4x100% |    |
|          |   |  | K   | Rp             | K  | Rp               | K   | Rp               | K                               | Rp             | K     | Rp             | K   | Rp | K     | Rp               | K   | Rp  | K  | Rp               | K  | Rp     | K            | Rp |
| 1.2.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |   |                |  |                  | 18,00 Unit  | 60.000.000,00    | 0                               | 0              | 12    | 0              |     |    | 12    | 0                | 66,67   | 0   | 12   | 0                | 12   | 0      | 12           | 0  |
| 1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |   |                |  |                  | 45,00 Unit  | 30.000.000,00    | 0                               | 0              | 30    | 0              |     |    | 30    | 0                | 66,67   | 0   | 30   | 0                | 30   | 0      | 30           | 0  |
| 1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |   |                |  |                  | 1,00 Unit   | 100.000.000,00   | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    | 0     | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                | 0  | 0      | 0            | 0  |
| 3.30.3   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  | Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern  | 9,00 Unit   | 670.000.000,00 | 100,00%  | 5.424.497.494,00 | 9,00 Unit   | 3.238.295.000,00 | 5,56                            | 478.500.000,00 | 8,33  | 713.550.000,00 |     |    | 13,89 | 1.192.050.000,00 | 1,25  | 36,81   | 13,89  | 1.192.050.000,00 | 13,89  | 177,92 |              |    |
| 3.2.01   | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>  | <b>Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern</b>   |   |                |  |                  | 100%  | 247.545.000,00   | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    | 0     | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                | 0  | 0      | 0            | 0  |
| 3.2.01.1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   |   |                |  |                  | 3,00 Unit   | 139.545.000,00   | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    | 0     | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                | 0  | 0      | 0            | 0  |
| 3.2.01.2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |   |                |  |                  | 1,00 Unit   | 108.000.000,00   | 0                               | 0              | 0     | 0              |     |    | 0     | 0                | 0   | 0   | 0  | 0                | 0  | 0      | 0            | 0  |
| 3.2.02   | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                | <b>Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern</b>   |   |                |  |                  | 100%  | 2.990.750.000,00 | 16,67                           | 478.500.000,00 | 25    | 713.550.000,00 |     |    | 41,67 | 1.192.050.000,00 | 41,67   | 39,86   | 41,67  | 1.192.050.000,00 | 41,67  | 177,92 |              |    |
| 3.2.02.2 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan         |   |                |  |                  | 12,00 Dokumen   | 2.990.750.000,00 | 2                               | 478.500.000,00 | 3     | 713.550.000,00 |     |    | 5     | 1.192.050.000,00 | 41,67   | 39,86   | 5  | 1.192.050.000,00 | 5  | 1,78   |              |    |
| 3.30.4   | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                      | Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan  | 4,00%   | 850.000.000,00 | 100,00%  | 717.577.875,00   | 4,00%   | 690.200.000,00   | 0                               | 0              | 66,67 | 204.573.126,00 |     |    | 66,67 | 204.573.126,00   | 2,67  | 29,64   | 66,67  | 204.573.126,00   | 66,67  | 24,07  |              |    |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)   | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |       |                |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) |                |              |       |
|----------|---|---|---|----------------|--|------------------|---|----------------|---------------------------------|----|-------|----------------|-----|----|----|----|---|---|--|-------|--|----------------|--------------|-------|
|          |   |   |   |                |  |                  |   |                | I                               |    | II    |                | III |    | IV |    |   |   |  |       |  |                |              |       |
| 1        | 2   | 3   | 4   |                | 5  |                  | 6   |                | 7                               |    | 8     |                | 9   |    | 10 |    | 11=7+8+9+10   |   | 12=11/6x100%   |       | 13=5+11  |                | 14=13/4x100% |       |
|          |   |   | K   | Rp             | K  | Rp               | K   | Rp             | K                               | Rp | K     | Rp             | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp    | K  | Rp             | K            | Rp    |
| 4.2.01   | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan   |   |                |  |                  | 100%  | 690.200.000,00 | 0                               | 0  | 66,67 | 204.573.126,00 |     |    |    |    | 66,67   | 204.573.126,00  | 66,67  | 29,64 | 66,67  | 204.573.126,00 | 66,67        | 24,07 |
| 4.2.01.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |   |                |  |                  | 3,00 Laporan  | 690.200.000,00 | 0                               | 0  | 2     | 204.573.126,00 |     |    |    |    | 2   | 204.573.126,00  | 66,67  | 29,64 | 2  | 204.573.126,00 | 2            | 0,24  |
| 3.30.5   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Nilai ekspor Kota Bekasi  | 475.000.000,00 US Dollar  | 450.000.000,00 | 100,00%  | 1.105.063.106,00 | 475.000.000,00 US Dollar  | 624.410.750,00 | 0                               | 0  | 33,33 | 104.998.415,00 |     |    |    |    | 33,33   | 104.998.415,00  | 158.333.333,33   | 16,82 | 33,33  | 104.998.415,00 | 33,33        | 23,33 |
| 5.2.01   | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Ekspor Kota Bekasi  |   |                |  |                  | 100%  | 624.410.750,00 | 0                               | 0  | 33,33 | 104.998.415,00 |     |    |    |    | 33,33   | 104.998.415,00  | 33,33  | 16,82 | 33,33  | 104.998.415,00 | 33,33        | 23,33 |
| 5.2.01.2 | Pameran Dagang Nasional   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang  |   |                |  |                  | 9,00 Pelaku   | 265.119.000,00 | 0                               | 0  | 9     | 104.998.415,00 |     |    |    |    | 9   | 104.998.415,00  | 100  | 39,6  | 9  | 104.998.415,00 | 9            | 0,23  |
| 5.2.01.3 | Pameran Dagang Lokal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal  |   |                |  |                  | 30,00 Pelaku  | 188.000.000,00 | 0                               | 0  | 0     | 0              |     |    |    |    | 0   | 0   | 0  | 0     | 0  | 0              | 0            | 0     |
| 5.2.01.4 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan  |   |                |  |                  | 125,00 Pelaku   | 171.291.750,00 | 0                               | 0  | 0     | 0              |     |    |    |    | 0   | 0   | 0  | 0     | 0  | 0              | 0            | 0     |
| 3.30.6   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | Persentase pertumbuhan alat UTPP yang ditera/tera ulang   | 5,00%   | 930.000.000,00 | 90,56%   | 256.427.000,00   | 5,00%   | 284.407.500,00 | 8,7                             | 0  | 13,73 | 36.968.100,00  |     |    |    |    | 22,43   | 36.968.100,00   | 1,12   | 13    | 22,43  | 36.968.100,00  | 22,43        | 3,98  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)                                   | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |          |               |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) |      |
|---|--|---|---|----------------|--|----|---|------------------|---------------------------------|---|----------|---------------|-----|--|----|--|---|---------------|---|-------------------|--|---------------|--|------|
|   |  |   | K   | Rp             | K  | Rp | K   | Rp               | I                               |   | II       |               | III |  | IV |  | 11=7+8+9+10   |               | 12=11/6x100%  |                   | 13=5+11  |               | 14=13/4x100%   |      |
| 1   | 2  | 3   | 4   |                | 5  |    | 6   |                  | 7                               |   | 8        |               | 9   |  | 10 |  | 11=7+8+9+10   |               | 12=11/6x100%  |                   | 13=5+11  |               | 14=13/4x100%   |      |
| 6.2.01  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                       | Persentase Pertumbuhan Alat UTPP yang Ditera/Tera Ulang   |   |                |  |    | 100%  | 284.407.500,00   | 8,7                             | 0 | 13,73    | 36.968.100,00 |     |  |    |  | 22,43   | 36.968.100,00 | 22,43   | 13                | 22,43  | 36.968.100,00 | 22,43  | 3,98 |
| 6.2.01.1  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang                                   |   |                |  |    | 24.560,00 Unit  | 199.349.500,00   | 4.274,00                        | 0 | 6.746,00 | 28.111.000,00 |     |  |    |  | 11.020,00   | 28.111.000,00 | 44,87   | 14,1              | 11.020,00  | 28.111.000,00 | 11.020,00  | 0,03 |
| 6.2.01.2  | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal  | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   |   |                |  |    | 106,00 Orang  | 85.058.000,00    | 0                               | 0 | 0        | 8.857.100,00  |     |  |    |  | 0   | 8.857.100,00  | 0   | 10,41             | 0  | 8.857.100,00  | 0  | 0,01 |
| 3.31  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |   |   |                |  |    | 100%  | 1.793.649.000,00 | 0                               | 0 | 0        | 0             |     |  |    |  | 0   | 0             | 0   | 0                 | 0  | 0             |  |      |
| 3.31.2  | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  |   |               |   |                   |  |               |  |      |
| 3.31.2  | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah   | 3,00%   | 850.000.000,00 | 0,00%  | 0  | 3,00%   | 1.793.649.000,00 | 0                               | 0 | 0        | 0             |     |  |    |  | 0   | 0             | 0   | 0                 | 0  | 0             | 0  | 0    |
| 2.2.01  | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                        | Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah   |   |                |  |    | 100%  | 1.793.649.000,00 | 0                               | 0 | 0        | 0             |     |  |    |  | 0   | 0             | 0   | 0                 | 0  | 0             | 0  | 0    |
| 2.2.01.5  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |   |                |  |    | 3,00 Dokumen  | 1.793.649.000,00 | 0                               | 0 | 0        | 0             |     |  |    |  | 0   | 0             | 0   | 0                 | 0  | 0             | 0  | 0    |
| <b>Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)</b>                           |  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  | 0   | 0             | 0   | 0                 | 0  | 0             |  |      |
| <b>Predikat kinerja Kegiatan</b>  |  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  | Sangat Rendah   |               |   |                   |  |               |  |      |
| <b>Rata-rata capaian kinerja Program (%)</b>                            |  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  | 0   | 0             | 0   | 0                 | 0  | 0             |  |      |
| <b>Predikat kinerja Program</b>   |  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  | Sangat Rendah   |               |   |                   |  |               |  |      |
| <b>RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)</b> |  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  | 30,65   | 38,04         | 30,65   | 13.560.529.821,00 |  |               |  |      |
| <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                            |  |   |   |                |  |    |   |                  |                                 |   |          |               |     |  |    |  | Sangat Rendah   |               |   |                   |  |               |  |      |

Catatan: Data diambil dari <https://siencang.bekasikota.go.id/> Realisasi Triwulan II Tahun 2025



Dilihat dari hasil evaluasi dalam e-monev yang berbasis kinerja output, rata-rata realisasi output Disdagperin Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 30,65% dengan realisasi anggarannya sebesar 38,04% atau sebesar 13.560.529.821,00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Apabila dilihat dari hasil evaluasi dalam Simpelbang yang berbasis progress fisik, realisasi fisik pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Disdagperin Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 59,23% dengan realisasi anggarannya sebesar 38,04% atau sebesar 13.560.529.821,00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perdagangan dan industry, termasuk pelaku IKM. Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menjadi indikator penting dalam mewujudkan pelayanan public yang responsive, efektif dan efisien.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun berkenaan yaitu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi:



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan (Indikator Kinerja Utama)**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**  
**Tahun 2025**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja             | Target Renstra               | Realisasi            | Tingkat Capaian (Realisasi terhadap Target) |
|----|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
|    |  |                               | 2025                         | 2025                 | 2025  |
| 1  | Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi | Nilai PDRB Sektor Perdagangan | 28.500 (dalam milyar Rupiah) | Belum dapat dihitung | Belum dapat dihitung                        |
| 4  | Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi    | Nilai PDRB Sektor Industri    | 44.000 (dalam milyar Rupiah) | Belum dapat dihitung | Belum dapat dihitung                        |

Sumber: Hasil Evaluasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan Triwulan III



Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan rangkaian aktivitas dalam mencapai IKU tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mencapai IKU **“Nilai PDRB Sektor Perdagangan”**, telah dilaksanakan rangkaian aktivitas seperti:
  - a. Pelaksanaan dan Pengawasan Tera/Tera Ulang UTTP;
  - b. Pelaksanaan Operasi Pasar sebanyak 2 kali;
  - c. Pelaksanaan Sidak Pasar menjelang Hari Raya Keagamaan;
  - d. Memfasilitasi pelaku usaha Kota Bekasi dalam keikutsertaan pada event Pameran Dagang Tingkat Nasional (Inacraft dan APEKSI);
  - e. Pelaksanaan Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen/Eceran;
  - f. Memfasilitasi pelaku usaha ekspor dalam penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Asal (SKA);
  - g. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan stake holder dalam Pelaksanaan Operasi Pasar (BULOG dan PD Pasar Jaya);
2. Untuk mencapai IKU **“Nilai PDRB Sektor Industri”**, telah dilaksanakan rangkaian aktivitas seperti:
  - a. Pelaksanaan monitoring dan verifikasi IKM dalam proses pengurusan perijinan berusaha;
  - b. Melakukan pengawasan/pengendalian izin kepada industri yang sudah memperoleh izin;
  - c. Mendorong IKM Kota Bekasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas produk yang mampu bersaing kompetitif di pasar global;

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian



dalam bentuk Dinas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 (dua) bidang urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Permasalahan terkait dengan urusan Perdagangan yang ada di Kota Bekasi adalah:

1. Permintaan/Kebutuhan Masyarakat terus meningkat menjelang Hari Raya namun jumlah ketersediaan tidak ikut meningkat (sama);
2. Kelangkaan barang kebutuhan tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya;
3. Inflasi kebutuhan barang pokok;
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
5. SDM pengelola pasar yang belum memadai.

Permasalahan terkait dengan urusan Perindustrian yang ada di Kota Bekasi adalah:

1. Permintaan masyarakat terhadap produk berkurang;
2. Biaya operasional lebih tinggi daripada keuntungan;
3. Kurangnya even-even sebagai wadah promosi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

*Review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Perubahan RKPD. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Hasil



*review* Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 terkait Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.3.**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025**

| No. | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025   |                   |  |                        |                                     | No.                   | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |  |                        |                                     | Catatan Penting       |  |
|-----|---|-------------------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                       | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                       |  |
| (1) | (2)   | (3)               | (4)  | (5)                    | (6)                                 | (7)                   | (8)   | (9)   | (9)  | (10)                   | (11)                                | (12)                  |  |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>IKP</b>        | <b>Optimalisasi Pelayanan Adminisitrasi Perkantoran</b>  | <b>Kota Bekasi</b>     | <b>100%</b>                         | <b>28.676.275.320</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>IKP</b>  | <b>Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</b>   | <b>Kota Bekasi</b>     | <b>100%</b>                         | <b>27.386.123.392</b> |  |
|     | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                   | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NPSK</b>  | <b>Kota Bekasi</b>     | <b>3 Laporan</b>                    | <b>14.999.000</b>     | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NPSK</b>  | <b>Kota Bekasi</b>     | <b>3 Dokumen</b>                    | <b>14.999.000</b>     |  |
| 1   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Bekasi            | 3 Laporan                           | 14.999.000            | 1   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rencana Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Bekasi            | 3 Laporan                           | 14.999.000            |  |
|     |   | <b>IKP</b>        | <b>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |                        | <b>100%</b>                         |                       |   | <b>IKP</b>  | <b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>  |                        | <b>86%</b>                          |                       |  |
|     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |                   | <b>Persentase Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Kota Bekasi</b>     | <b>100%</b>                         | <b>23.658.320.000</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   | <b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>  | <b>Kota Bekasi</b>     | <b>3 Laporan</b>                    | <b>23.865.369.000</b> |  |
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Bekasi            | 3.380 Orang/Bulan                   | 23.643.320.000        |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Bekasi            | 4.264 Orang/Bulan                   | 23.850.369.000        |  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| No. | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025                           |  |             |                        |                                     | No. | Hasil Analisis Kebutuhan                                      |  |             |                        |                                    | Catatan Penting |
|-----|---|--|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----|---|--|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja  | Lokasi      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja  | Lokasi      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)         | (5)                    | (6)                                 | (7) | (8)   | (9)  | (9)         | (10)                   | (11)                               | (12)            |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Bekasi | 2 Laporan              | 15.000.000                          |     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Bekasi | 2 Laporan              | 15.000.000                         |                 |
|     |   | <b>IKP</b> Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah                                     |             | 83%                    |                                     |     |   | <b>IKP</b> Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah                                     |             | 83%                    |                                    |                 |
|     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>                           | Kota Bekasi | 3 Laporan              | 473.500.000                         |     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>                           | Kota Bekasi | 3 Laporan              | 473.500.000                        |                 |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Kota Bekasi | 140 orang              | 260.000.000                         | 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Kota Bekasi | 1 Paket                | 260.000.000                        |                 |
|     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | Kota Bekasi | 10 Orang               | 13.500.000                          | 2   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | Kota Bekasi | 10 Orang               | 13.500.000                         |                 |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | Kota Bekasi | 140 Orang              | 200.000.000                         |     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | Kota Bekasi | 140 Orang              | 200.000.000                        |                 |
|     |   | <b>IKP</b> Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan  |             | 86%                    |                                     |     |   | <b>IKP</b> Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan  |             | 86%                    |                                    |                 |
|     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>                                  |             | 16 Laporan             | 544.172.000                         |     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>                                  |             | 16 Laporan             | 544.172.000                        |                 |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kota Bekasi | 5 Paket                | 375.567.000                         |     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |             | 5 Paket                | 375.567.000                        |                 |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Kota Bekasi | 2 Paket                | 9.999.000                           |     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |             | 2 Paket                | 9.999.000                          |                 |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| No. | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025                                     |                   |   |                        |                                     | No.                  | Hasil Analisis Kebutuhan        |   |  |   |                                    | Catatan Penting   |                      |  |
|-----|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                      | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |                   |                      |  |
| (1) | (2)   | (3)               | (4)   | (5)                    | (6)                                 | (7)                  | (8)                             | (9)   | (9)  | (10)  | (11)                               | (12)              |                      |  |
|     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | Kota Bekasi            | 12 Dokumen                          | 45.000.000           |                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | Kota Bekasi                        | 12 Dokumen        | 45.000.000           |  |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Kota Bekasi            | 12 Laporan                          | 60.000.000           |                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Kota Bekasi                        | 12 Laporan        | 60.000.000           |  |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Kota Bekasi            | 1 Dokumen                           | 53.606.000           |                                 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Kota Bekasi                        | 1 Dokumen         | 53.606.000           |  |
|     |   | <b>IKP</b>        | <b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b>                                  |                        | <b>80%</b>                          |                      |                                 | <b>IKP</b>  | <b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b> |   | <b>80%</b>                         |                   |                      |  |
|     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   | <b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>   |                        | <b>1 Laporan</b>                    | <b>11.000.000</b>    |                                 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  | <b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>   |                                    | <b>1 Laporan</b>  | <b>41.000.000</b>    |  |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Kota Bekasi            | 6 Unit                              | 11.000.000           |                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Kota Bekasi                        | 6 Unit            | 41.000.000           |  |
|     |   | <b>IKP</b>        | <b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>                                       |                        | <b>86%</b>                          |                      |                                 | <b>IKP</b>  | <b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>      |   | <b>86%</b>                         |                   |                      |  |
|     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b> |                        | <b>24 Laporan</b>                   | <b>3.591.284.320</b> |                                 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |  | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b> |                                    | <b>24 Laporan</b> | <b>1.964.082.492</b> |  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | Kota Bekasi            | 12 Laporan                          | 100.000.000          |                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | Kota Bekasi                        | 12 Laporan        | 100.000.000          |  |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | Kota Bekasi            | 12 Laporan                          | 3.491.284.320        |                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | Kota Bekasi                        | 12 Laporan        | 1.864.082.492        |  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| No. | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025  |                   |  |                        |                                     | No.                  | Hasil Analisis Kebutuhan        |  |  |                        |                                    | Catatan Penting      |  |
|-----|--|-------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                      | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |                      |  |
| (1) | (2)  | (3)               | (4)  | (5)                    | (6)                                 | (7)                  | (8)                             | (9)  | (9)  | (10)                   | (11)                               | (12)                 |  |
|     |  | <b>IKP</b>        | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel  |                        | 86%                                 |                      |                                 | <b>IKP</b>   | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel  |                        | 86%                                |                      |  |
|     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   | <b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>                                 |                        | <b>4 Laporan</b>                    | <b>383.000.000</b>   |                                 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>                                 |                        | <b>4 Laporan</b>                   | <b>483.000.000</b>   |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Kota Bekasi            | 6 Unit                              | 200.000.000          |                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Kota Bekasi            | 6 Unit                             | 250.000.000          |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Bekasi            | 18 Unit                             | 60.000.000           |                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Bekasi            | 18 Unit                            | 110.000.000          |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Bekasi            | 15 Unit                             | 30.000.000           |                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Bekasi            | 45 Unit                            | 30.000.000           |  |
|     | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kota Bekasi            | 1 Unit                              | 93.000.000           |                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kota Bekasi            | 1 Unit                             | 93.000.000           |  |
|     | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>IKP</b>        | <b>Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi</b>   |                        | <b>10 Unit</b>                      | <b>3.201.170.000</b> |                                 | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>IKP</b> <b>Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi</b>  |                        | <b>10 Unit</b>                     | <b>3.142.170.000</b> |  |
|     | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   |                   | <b>Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                |                        | <b>4 Unit</b>                       | <b>212.220.000</b>   |                                 | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                |                        | <b>4 Unit</b>                      | <b>312.220.000</b>   |  |
|     | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   |                   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   | Kota Bekasi            | 2 Unit                              | 104.220.000          |                                 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   | Kota Bekasi            | 2 Unit                             | 104.220.000          |  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| No. | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025  |   |             |                        |                                     | No. | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |             |                        |                                     | Catatan Penting |
|-----|--|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----|--|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)         | (5)                    | (6)                                 | (7) | (8)  | (9)   | (9)         | (10)                   | (11)                                | (12)            |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Bekasi | 2 Unit                 | 108.000.000                         |     | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Bekasi | 2 Unit                 | 208.000.000                         |                 |
|     | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                 | <b>Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                 |             | <b>100%</b>            | <b>2.988.950.000</b>                |     | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                 | <b>Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                 |             | <b>12 Dokumen</b>      | <b>2.829.950.000</b>                |                 |
|     | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Bekasi | 12 Dokumen             | 2.988.950.000                       |     | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Bekasi | 12 Dokumen             | 2.829.950.000                       |                 |
|     | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>IKP Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan</b>   |             | <b>&lt;4,0%</b>        | <b>2.683.000.000</b>                |     | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>IKP Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan</b>   |             | <b>&lt;4,0%</b>        | <b>2.683.000.000</b>                |                 |
|     | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                | Jumlah Laporan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                |             | 5 Laporan              | 2.683.000.000                       |     | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                | Jumlah Laporan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                |             | 5 Laporan              | 2.683.000.000                       |                 |
|     | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kota Bekasi | 5 Laporan              | 2.683.000.000                       |     | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kota Bekasi | 5 Laporan              | 2.683.000.000                       |                 |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>IKP Nilai Ekspor</b>   |             | <b>USD 375.000.000</b> | <b>497.680.750</b>                  |     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>IKP Nilai Ekspor</b>   |             | <b>USD 375.000.000</b> | <b>1.019.794.750</b>                |                 |
|     | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang                           | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor                                  |             | 194 Pelaku Usaha       | 497.680.750                         |     | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor                                  |             | 194 Pelaku Usaha       | 1.019.794.750                       |                 |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| No. | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025                                  |                   |  |                        |                                     | No.                  | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |   |                        |                                     | Catatan Penting    |
|-----|--|-------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                      | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |                    |
| (1) | (2)  | (3)               | (4)  | (5)                    | (6)                                 | (7)                  | (8)  | (9)  | (10)  | (11)                   | (12)                                |                    |
|     | Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         |                   |  |                        |                                     |                      | pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  |  |   |                        |                                     |                    |
|     | Pameran Dagang Nasional  |                   | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitas dalam Pameran Dagang                         | Kota Bekasi            | 15 Pelaku Usaha                     | 220.159.000          | Pameran Dagang Nasional  | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitas dalam Pameran Dagang                         | Kota Bekasi   | 15 Pelaku Usaha        | 420.159.000                         |                    |
|     | Pameran Dagang Lokal   |                   | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitas dalam Pameran Dagang Lokal                   | Kota Bekasi            | 30 Pelaku Usaha                     | 186.650.000          | Pameran Dagang Lokal   | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitas dalam Pameran Dagang Lokal                   | Kota Bekasi   | 30 Pelaku Usaha        | 186.650.000                         |                    |
|     | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                              |                   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan     | Kota Bekasi            | 149 Pelaku Usaha                    | 90.871.750           | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                              | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan     | Kota Bekasi   | 149 Pelaku Usaha       | 412.985.750                         |                    |
|     | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>               | <b>IKP</b>        | <b>Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera</b>                                |                        | <b>2%</b>                           | <b>219.907.500</b>   | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>               | <b>IKP</b>   | <b>Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera</b>                   |                        | <b>2%</b>                           | <b>219.907.500</b> |
|     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |                   | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi Legal                 |                        | <b>2 Laporan</b>                    | <b>219.907.500</b>   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi Legal                 |   | <b>2 Laporan</b>       | <b>219.907.500</b>                  |                    |
|     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 |                   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang     | Kota Bekasi            | 24.560 Unit                         | 149.009.500          | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang     | Kota Bekasi   | 24.560 Unit            | 149.009.500                         |                    |
|     | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal                               |                   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                          | Kota Bekasi            | 106 Orang                           | 70.898.000           | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal                               | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                          | Kota Bekasi   | 106 Orang              | 70.898.000                          |                    |
|     | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                  | <b>IKP</b>        | <b>Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Difasilitasi</b>              |                        | <b>14%</b>                          | <b>1.477.239.000</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                  | <b>IKP</b>   | <b>Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Difasilitasi</b> |                        | <b>14%</b>                          | <b>910.608.000</b> |
|     | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  |                   | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |                        | <b>3 Dokumen</b>                    | <b>1.477.239.000</b> | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |   | <b>3 Dokumen</b>       | <b>910.608.000</b>                  |                    |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| No.          | Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025  |   |             |                        |                                     | No. | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |             |                        |                                    | Catatan Penting |
|--------------|--|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----|--|---|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
|              | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| (1)          | (2)  | (3)   | (4)         | (5)                    | (6)                                 | (7) | (8)  | (9)   | (10)        | (11)                   | (12)                               |                 |
|              | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota Bekasi | 3 Dokumen              | 1.477.239.000                       |     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota Bekasi | 3 Dokumen              | 910.608.000                        |                 |
| <b>TOTAL</b> |  |   |             |                        | <b>36.755.273.470</b>               |     |  |   |             |                        | <b>35.361.603.642</b>              |                 |



## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2025 akan disampaikan usulan kegiatan dari hasil pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bekasi untuk tahun 2025 yang ditujukan ke Perangkat Daerah Kota Bekasi. Belum terdapat usulan program dan kegiatan yang ditujukan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2025**  
**Pemerintah Kota Bekasi**

| NO | PROGRAM | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|----|---------|--------|-------------------|-----------------|---------|
|    |         |        |                   |                 |         |
|    |         |        |                   |                 |         |

NIHIL



### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Agar keseimbangan terjadi maka komitmen pembangunan ekonomi harus diarahkan pada keberpihakan kepada masyarakat.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tujuan pelaksanaan P3DN antara lain untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri. Program ini menjadi sangat penting dalam mendukung keberlangsungan usaha dari para pelaku usaha industri sekaligus menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Tujuan Ke-3: **“Terwujudnya Struktur Ekonomi Kota Bekasi yang Tangguh dan Inklusif”** dan Sasaran: **“Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri”** RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Adapun untuk mencapai tujuan Kota Bekasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menetapkan tujuan dinas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun implementasi dari misi dinas. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri”. Tujuan ini menekankan upaya strategis Pemerintah Kota Bekasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan fokus pada tiga sektor utama:



### 1. Perdagangan

Meningkatkan aktivitas perdagangan, baik perdagangan antarwarga maupun perdagangan dengan daerah lain, agar arus barang dan jasa lancar serta memberikan kontribusi terhadap PDRB.

### 2. Jasa

Mengembangkan sektor jasa seperti keuangan, transportasi, pariwisata, dan layanan publik, sehingga memberikan nilai tambah dan peluang kerja bagi masyarakat.

### 3. Industri

Memajukan sektor industri yang ada di Kota Bekasi, baik industri manufaktur maupun industri kecil menengah, untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, tujuan ini mengarahkan semua program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk menciptakan ekonomi kota yang stabil, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga sektor unggulan tersebut.

Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi

Sasaran ini menekankan upaya untuk memperkuat kemampuan dan kualitas sektor perdagangan di Kota Bekasi agar lebih kompetitif baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, perbaikan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, serta pemenuhan standar pasar sesuai kebutuhan dan harapan konsumen. Dengan demikian, sektor perdagangan Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan produk dan layanan yang berdaya saing tinggi, memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi

Sasaran ini menekankan upaya untuk memperkuat struktur, kapasitas, dan kualitas sektor industri di Kota Bekasi agar mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi industri, penguatan inovasi dan teknologi, pengembangan sumber



daya manusia industri yang kompeten, serta pemenuhan standar mutu dan lingkungan. Dengan demikian, sektor industri Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, mendorong investasi, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Target pembangunan dari masing-masing indikator berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran dalam Renstra Disdagperin Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka pada tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan melaksanakan 5 Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan 1 Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Adapun kegiatan yang akan direncanakan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp35.361.603.642**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Jumlah Program : 5
- Jumlah Kegiatan : 12
- Jumlah Sub Kegiatan : 27
- Pagu Anggaran : Rp. 34.450.995.642

b. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Jumlah Program : 1
- Jumlah Kegiatan : 1



- Jumlah Sub Kegiatan : 1
- Pagu Anggaran : Rp. 910.608.000

Secara rinci berikut adalah perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025:



Tabel 3.1

### Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025

| NO. | KODE               | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN  | LOKASI  | SUMBER DANA | SEBELUM PERUBAHAN |                   | SETELAH PERUBAHAN |                   | TAMBAH/KURANG<br>(Rp) | KETERANGAN   |
|-----|--------------------|---|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
|     |                    |   |  |   |             | TARGET            | PAGU (Rp)         | TARGET            | PAGU (Rp)         |                       |  |
| (1) | (2)                | (3)   | (4)  | (5)   | (6)         | (7)               | (8)               | (9)               | (10)              | (11)                  | (12)   |
|     |                    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   |  |   |             |                   | 35.647.654.470    |                   | 35.361.603.642    |                       |  |
|     | 3                  | URUSAN PEMERINTAH PILIHAN   |  |   |             |                   | 35.647.654.470    |                   | 35.361.603.642    |                       |  |
|     | 3.30               | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |  |   |             |                   | 33.854.005.470    |                   | 34.450.995.642    |                       |  |
|     | 3.30.01            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran  |   |             |                   | 100%              | 29.016.692.220    | 100%              | 27.386.123.392        |  |
|     | 3.30.01.2.01       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK   |   |             |                   | 3 Dokumen         | 14.999.000        | 3 Dokumen         | 14.999.000            |  |
|     | 3.30.01.2.01.0006  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PAD         |                   | 3 Laporan         | 14.999.000        | 3 Laporan         | 14.999.000            |  |
|     |                    |   | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan   |   |             |                   | 86%               |                   | 86%               |                       |  |
|     | 3.30.01.2.02       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK   |   |             |                   | 3 Laporan         | 23.658.320.000    | 3 Laporan         | 23.865.369.000        |  |
|     | 3.30.01.2.02.0001  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PAD dan DAU |                   | 5.824 Orang/Bulan | 23.643.320.000    | 4.264 Orang/Bulan | 23.850.369.000        | (207.049.000) - Perubahan anggaran dan target, dikarenakan adanya penyesuaian jumlah pegawai;<br>- Penyesuaian gaji dan tunjangan JFT Penerima Penyelia. |
|     | 3.30.01.2.02.0005  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya        | PAD         |                   | 2 Laporan         | 15.000.000        | 2 Laporan         | 15.000.000            |  |
|     |                    |   | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah   |   |             |                   | 83%               |                   | 83%               |                       |  |
|     | 3.30.01.2.05       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK  |   |             |                   | 3 Laporan         | 475.000.000       | 3 Laporan         | 473.500.000           |  |
|     | 3.30.01.2.05.02    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Kota Bekasi   | PAD         |                   | 140 orang         | 260.000.000       | 140 orang         | 260.000.000           |  |
|     | 3.30.01.2.05.0009  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya        | PAD         |                   | 10 Orang          | 15.000.000        | 10 Orang          | 13.500.000            | (1.500.000) Efisiensi terkait Inpres no. 1 tahun 2025  |
|     | 3.30.01.2.05.00011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kota Bekasi   | PAD         |                   | 140 Orang         | 200.000.000       | 140 Orang         | 200.000.000           |  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| NO. | KODE                | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | LOKASI                                       | SUMBER DANA | SEBELUM PERUBAHAN |                      | SETELAH PERUBAHAN |                      | TAMBAH/KURANG<br>(Rp) | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|---|---|--|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--|
|     |                     |   |   |  |             | TARGET            | PAGU (Rp)            | TARGET            | PAGU (Rp)            |                       |  |
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)  | (6)         | (7)               | (8)                  | (9)               | (10)                 | (11)                  | (12)   |
|     |                     |   | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan  |  |             | 86%               |                      | 86%               |                      |                       |  |
|     | <b>3.30.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>                   |  |             | <b>16 Laporan</b> | <b>796.172.000</b>   | <b>16 Laporan</b> | <b>544.172.000</b>   |                       |  |
|     | 3.30.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | SILPA       | 5 Paket           | 437.567.000          | 5 Paket           | 375.567.000          | (62.000.000)          | - Efisiensi terkait Inpres no. 1 tahun 2025<br>- Pergeseran Anggaran untuk Belanja Cetak Karcis Retribusi Parkir Motor dan Mobil |
|     | 3.30.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | SILPA       | 2 Paket           | 9.999.000            | 2 Paket           | 9.999.000            |                       |  |
|     | 3.30.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                        | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | PAD         | 12 Dokumen        | 45.000.000           | 12 Dokumen        | 45.000.000           |                       |  |
|     | 3.30.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | PAD         | 12 Laporan        | 250.000.000          | 12 Laporan        | 60.000.000           | (190.000.000)         | - Efisiensi terkait Inpres no. 1 tahun 2025  |
|     | 3.30.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | SILPA       | 1 Dokumen         | 53.606.000           | 1 Dokumen         | 53.606.000           |                       |  |
|     |                     |   | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah                              |  |             | 83%               |                      | 83%               |                      |                       |  |
|     | <b>3.30.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>                                 |  |             | <b>1 Laporan</b>  | <b>90.916.000</b>    | <b>1 Laporan</b>  | <b>41.000.000</b>    |                       |  |
|     | 3.30.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | DAU         | 6 Unit            | 90.916.000           | 6 Unit            | 41.000.000           | (49.916.000)          | Efisiensi terkait Inpres no. 1 tahun 2025  |
|     |                     |   | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan  |  |             | 86%               |                      | 86%               |                      |                       |  |
|     | <b>3.30.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b> |  |             | <b>24 Laporan</b> | <b>3.591.284.320</b> | <b>24 Laporan</b> | <b>1.964.082.492</b> |                       |  |
|     | 3.30.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | PAD         | 12 Laporan        | 100.000.000          | 12 Laporan        | 100.000.000          |                       |  |
|     | 3.30.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | Kota Bekasi,<br>Bekasi Selatan,<br>Margajaya | PAD         | 12 Laporan        | 3.491.284.320        | 12 Laporan        | 1.864.082.492        | (1.627.201.828)       | Penyesuaian Belanja Pegawai  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| NO. | KODE                | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | LOKASI   | SUMBER DANA | SEBELUM PERUBAHAN |                      | SETELAH PERUBAHAN |                      | TAMBAH/KURANG<br>(Rp) | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|--|---|--|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--|
|     |                     |  |   |  |             | TARGET            | PAGU (Rp)            | TARGET            | PAGU (Rp)            |                       |  |
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)  | (6)         | (7)               | (8)                  | (9)               | (10)                 | (11)                  | (12)   |
|     |                     |  | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah  |  |             | 83%               |                      | 83%               |                      |                       |  |
|     | <b>3.30.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>  | <b>Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya</b>        |             | <b>4 Laporan</b>  | <b>390.000.000</b>   | <b>4 Laporan</b>  | <b>483.000.000</b>   |                       |  |
|     | 3.30.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                          | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya               | SILPA       | 6 Unit            | 200.000.000          | 6 Unit            | 250.000.000          | 50.000.000            | Penambahan anggaran belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan                              |
|     | 3.30.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                          | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya               | SILPA       | 18 Unit           | 60.000.000           | 18 Unit           | 110.000.000          | 50.000.000            | Penambahan anggaran belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional                          |
|     | 3.30.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya               | SILPA       | 15 Unit           | 30.000.000           | 15 Unit           | 30.000.000           |                       |  |
|     | 3.30.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya               | SILPA       | 1 Unit            | 100.000.000          | 1 Unit            | 93.000.000           | (7.000.000)           | Efisiensi terkait Inpres no 1 tahun 2025   |
|     | <b>3.30.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi</b>  |  |             | <b>10 Unit</b>    | <b>3.238.295.000</b> | <b>10 Unit</b>    | <b>3.142.170.000</b> |                       |  |
|     | <b>3.30.03.2.01</b> | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b> |             | <b>10 Unit</b>    | <b>247.545.000</b>   | <b>100%</b>       | <b>312.220.000</b>   |                       |  |
|     | 3.30.03.2.01.0001   | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan        | DBH         | 2 Unit            | 139.545.000          | 2 Unit            | 104.220.000          | (33.325.000)          | Efisiensi terkait Inpres no 1 tahun 2025   |
|     | 3.30.03.2.01.0002   | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan        | DBH         | 2 Unit            | 108.000.000          | 2 Unit            | 208.000.000          | 100.000.000           | Penambahan anggaran untuk Naskah Akademik Kajian PD Pasar Kota Bekasi                |
|     | <b>3.30.03.2.02</b> | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                   | <b>Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                 |  |             | <b>12 Dokumen</b> | <b>2.990.750.000</b> | <b>100%</b>       | <b>2.829.950.000</b> |                       |  |
|     | 3.30.03.2.02.0002   | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                  | Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan        | PAD         | 12 Dokumen        | 2.990.750.000        | 12 Dokumen        | 2.829.950.000        | (160.800.000)         | Penyesuaian Belanja Jasa Tenaga Non ASN yang diangkat menjadi PPPK sebanyak 25 orang |
|     | <b>3.30.04</b>      | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan</b>   |  |             | <b>&lt;4,0%</b>   | <b>690.200.000</b>   | <b>&lt;4,0%</b>   | <b>2.683.000.000</b> |                       |  |
|     | <b>3.30.04.2.01</b> | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>           | <b>Jumlah Laporan Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |             | <b>3 Laporan</b>  | <b>690.200.000</b>   | <b>5 Laporan</b>  | <b>2.683.000.000</b> |                       |  |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| NO. | KODE                | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | LOKASI  | SUMBER DANA | SEBELUM PERUBAHAN       |                      | SETELAH PERUBAHAN       |                      | TAMBAH/KURANG<br>(Rp) | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|--|---|---|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
|     |                     |  |   |   |             | TARGET                  | PAGU (Rp)            | TARGET                  | PAGU (Rp)            |                       |  |
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)   | (6)         | (7)                     | (8)                  | (9)                     | (10)                 | (11)                  | (12)   |
|     | 3.30.04.2.01.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PAD         | 3 Laporan               | 690.200.000          | 5 Laporan               | 2.683.000.000        | (1.992.800.000)       | Penambahan anggaran untuk kegiatan operasi pasar murah sebesar Rp 500.000.000 dan operasi pasar bersubsidi Rp 1.500.000.000  |
|     | <b>3.30.05</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>Nilai Ekspor</b>   |   |             | <b>USD 530.000.000</b>  | <b>624.410.750</b>   | <b>USD 375.000.000</b>  | <b>1.019.794.750</b> |                       |  |
|     | <b>3.30.05.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</b>                  |   |             | <b>164 Pelaku Usaha</b> | <b>624.410.750</b>   | <b>194 Pelaku Usaha</b> | <b>1.019.794.750</b> |                       |  |
|     | 3.30.05.201.02      | Pameran Dagang Nasional  | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi dalam Pameran Dagang   | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan                     | PAD         | 9 Pelaku Usaha          | 265.119.000          | 15 Pelaku Usaha         | 420.159.000          | 155.040.000           | Penambahan Anggaran fasilitasi kegiatan Dekranasda   |
|     | 3.30.05.201.03      | Pameran Dagang Lokal   | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal   | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan                     | PAD         | 30 Pelaku Usaha         | 188.000.000          | 30 Pelaku Usaha         | 186.650.000          | 1.350.000             | Efisiensi terkait Inpres no 1 tahun 2025   |
|     | 3.30.05.2.01.0004   | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan  | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PAD         | 125 Pelaku Usaha        | 171.291.750          | 149 Pelaku Usaha        | 412.985.750          | 241.694.000           | Penambahan anggaran untuk fasilitasi coaching clinic   |
|     | <b>3.30.06</b>      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera Ulang</b>   |   |             | <b>2%</b>               | <b>284.407.500</b>   | <b>3%</b>               | <b>219.907.500</b>   |                       |  |
|     | <b>3.30.06.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  | <b>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi Legal</b>   |   |             | <b>2 Laporan</b>        | <b>284.407.500</b>   | <b>2 Laporan</b>        | <b>219.907.500</b>   |                       |  |
|     | 3.30.06.2.01.0001   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang  | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | DBH         | 24.560 Unit             | 199.349.500          | 24.560 Unit             | 149.009.500          | (50.340.000)          | Efisiensi terkait Inpres no 1 tahun 2025   |
|     | 3.30.06.2.01.0002   | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | DBH         | 106 Orang               | 85.058.000           | 106 Orang               | 70.898.000           | (14.160.000)          | Efisiensi terkait Inpres no 1 tahun 2025   |
|     | <b>3.31</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |   |   |             |                         | <b>1.793.649.000</b> |                         | <b>910.608.000</b>   |                       |  |
|     | <b>3.31.02</b>      | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi</b>   |   |             | <b>15%</b>              | <b>1.793.649.000</b> |                         | <b>910.608.000</b>   |                       |  |
|     | <b>3.31.02.01</b>   | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>   |   |             | <b>3 Dokumen</b>        | <b>1.793.649.000</b> |                         | <b>910.608.000</b>   |                       |  |
|     | 3.31.02.01.0005     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                 | Kota Bekasi,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | DBH         | 3 Dokumen               | 1.793.649.000        | 3 Dokumen               | 910.608.000          | (883.041.000)         | - Indikator dan target Program disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 menjadi Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang difasilitasi : 14%<br>- Pergeseran antar rekening belanja<br>Pergeseran pagu anggaran ke subkegiatan : |



## Renja Perubahan Disdagperin Tahun 2025



| NO. | KODE | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | SEBELUM PERUBAHAN |                | SETELAH PERUBAHAN |                | TAMBAH/KURANG<br>(Rp) | KETERANGAN  |
|-----|------|--|---|--------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---|
|     |      |  |   |        |             | TARGET            | PAGU (Rp)      | TARGET            | PAGU (Rp)      |                       |   |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)    | (6)         | (7)               | (8)            | (9)               | (10)           | (11)                  | (12)  |
|     |      |  |   |        |             |                   |                |                   |                |                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pameran Dagang Nasional sebesar Rp. 322.114.000</li><li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 50.000.000</li><li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 50.000.000</li><li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 14.517.000</li><li>- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 30.000.000</li><li>- Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 100.000.000</li></ul> |
|     |      |  |   |        |             |                   | 35.647.654.470 |                   | 35.361.603.642 | 268.050.828           |   |



Pada Rencana Kerja Tahun 2025 ini Disdagperin melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sesuai RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yakni pada Tujuan Ke-1 dan Tujuan Ke-5. Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Pertama adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Kedua yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjang program prioritas yang berkaitan dengan tupoksi Disdagperin dengan 4 (empat) tujuan sebagai tindak lanjut dari Tujuan Pembangunan Kota Bekasi Ke-1 dan Ke-5 Kota Bekasi tersebut, yakni:

- 1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin;**
- 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan;**
- 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri;**
- 4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.**

Keempat tujuan tersebut di atas yang kemudian diuraikan menjadi 6 (enam) program kegiatan sesuai Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disdagperin Tahun Anggaran 2025 di atas yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Disdagperin pada tahun 2025.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang sangat strategis dari Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini merupakan pula keberhasilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karenanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengikat sinergi bidang-bidang dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan target Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan juga dijadikan landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hal di atas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang-bidang;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban untuk melaksanakan Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025;
3. Melakukan pengelompokan indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan urusan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 guna menjaga kesesuaian administrasi penganggaran dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.



Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025 dibuat sebagai bahan lanjutan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025.

Bekasi, 04 September 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,



Dia. NKA INDAH YARTI, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196701141986102001